

INTISARI

Agenda utama program pengelolaan lahan Indonesia adalah reforma agraria yang mengkonsolidasikan dan mendistribusikan tanah untuk keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mendirikan institusi baru bernama Bank Tanah. Selain untuk mempercepat pencapaian reforma agraria, bank tanah berfungsi untuk percepatan dalam penyediaan tanah bagi investasi dan aktifitas ekonomi. Namun bagi sebagian orang tujuan Bank Tanah tersebut berseberangan dengan tujuan reforma agraria karena mengesampingkan fungsi keadilan sosial dan pemerataan. Sehingga, muncul pertanyaan besar yang perlu dijawab, apakah Indonesia memang membutuhkan Bank Tanah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi alasan pembentukan Bank Tanah di Indonesia. Kedua, untuk mengeksplorasi kekurangan dan kelebihan praktek Bank Tanah dengan menggunakan konsep saat ini. Yang terakhir, menjelaskan praktik operasionalisasi Bank Tanah di Indonesia setelah disahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan mengidentifikasi alasan, kritik serta praktek operasionalisasi praktek bank tanah, maka keluaran penelitian ini mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan konsep bank tanah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif-induktif menggunakan deskriptif konten analisis. Sumber data berasal dari data sekunder berupa publikasi ilmiah, artikel media massa, seminar online, *interview* dan *focus group discussion* yang diproses menggunakan *coding* software MAXQDA 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua tema besar alasan dibentuknya bank tanah, yaitu alasan amanat regulasi peraturan perundang-undangan dan alasan untuk menyelesaikan isu lingkungan, tata ruang dan pertanahan. Dengan dibentuknya bank tanah, maka diharapkan berdampak positif terhadap terselesaikannya isu permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Namun, sebagian para ahli tetap berpendapat bahwa konseptualisasi bank tanah di Indonesia perlu diperbaiki karena *unconstitutional* (berseberangan dengan agenda reforma agraria) dan *overlapping* dengan fungsi institusi eksisting. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah, Indonesia tetap membutuhkan Bank Tanah namun perlu merevisi tujuan dan arah kelembagaan agar selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Keywords:

Bank, Tanah, Lahan, Reforma, Agraria

ABSTRACT

The major agenda of Indonesia's land management program is agrarian reform which consolidates and distributes land for social justice. However, instead of strengthening the existing institution and implementing the agrarian reform agenda, Indonesia established a new institution called the Land Bank Agency. This institution can aggravate land management practices in Indonesia because it encourages land for investment and economic growth. Therefore, a major question emerges: Does Indonesia need a Land Bank Agency?

To conduct this research, different aims were created. First, identify the reason for Indonesia's establishment of the Land Bank Agency. Then, explore the advantages and drawbacks. Last, explores the operationalization of land banking practices in Indonesia. By identifying the reasons, advantages, and drawbacks of the current land banking practices, this study is expected to draw recommendations for the Indonesian government to improve the land bank policies and practices in the future.

This research is a case study with an inductive qualitative approach using descriptive content analysis. The source data comes from scientific publications, mass media articles, online seminars, interviews, and focus group discussions that are processed using the MAXQDA 2020 coding software.

Research findings show two big reasons for Indonesia's establishment of the Land Bank Agency: the mandate of regulatory legislation and resolving environmental, spatial, and land issues. Furthermore, the establishment of the Land Bank Agency is expected to have a positive impact, namely on the resolution of land and spatial problems in Indonesia. Although some experts argue that Indonesia's Land Bank is unconstitutional due to opposing agrarian reform and overlapping with existing institutions, Indonesia still needs the Land Bank. Therefore, this thesis recommends that the government revise the objectives and institutional direction of the Land Bank Agency to align with the national land development agenda.

Keywords:

Land Bank Agency, Agrarian Reform, Land Issues, Spatial Planning